

BAB I

PENDAHULUAN

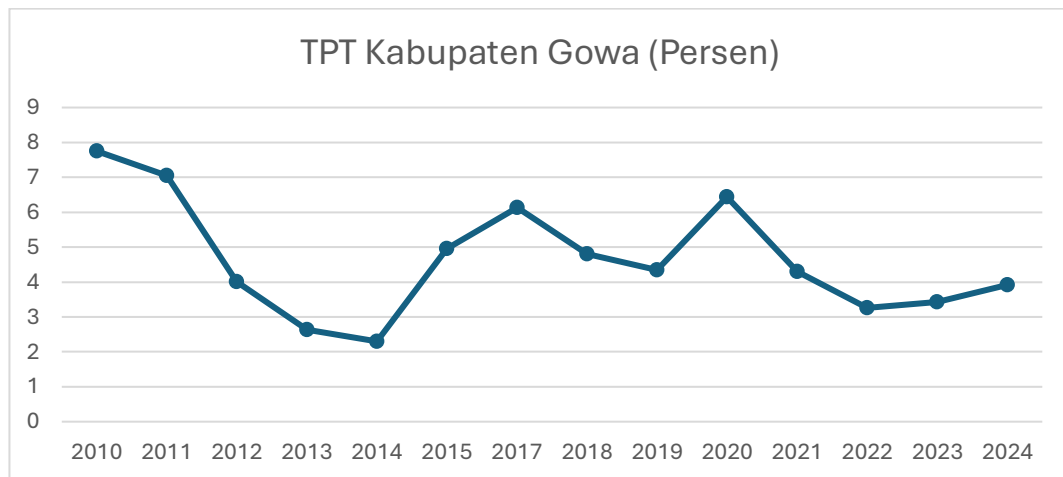
1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat bagi seluruh warga negara. Salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara adalah tingkat pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah memiliki pekerjaan tapi belum mulai bekerja (Husmanns et al. 1990). Sedangkan menurut Subri (2003), Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut.

Pengangguran merupakan salah satu isu yang penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia, yang tidak hanya memengaruhi kesejahteraan individu tetapi juga stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan jumlah angkatan kerja yang sudah memasuki golongan siap kerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan, dan hal ini sering kali menjadi indikator utama kemajuan ekonomi suatu wilayah.

Kabupaten Gowa dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki posisi strategis sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar, yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam perspektif ekonomi regional, kedekatan geografis dengan pusat pertumbuhan seharusnya memberikan *spillover effect* berupa peningkatan aktivitas ekonomi,

perluasan kesempatan kerja, serta penyerapan tenaga kerja lintas wilayah. Oleh karena itu, secara teori, wilayah seperti Kabupaten Gowa diharapkan memiliki tingkat pengangguran yang relatif lebih stabil dan cenderung menurun seiring berkembangnya pusat ekonomi di sekitarnya.



Gambar 1. 1 Tren Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gowa Tahun 2010 – 2024

Namun, dari Gambar 1.1 menunjukkan fenomena yang berbeda. Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Gowa selama periode 2010–2024 memperlihatkan fluktuasi yang cukup tajam dari tahun ke tahun. Ketidakstabilan TPT ini terjadi meskipun Kabupaten Gowa berada dalam lingkup pengaruh ekonomi Kota Makassar dan mengalami pertumbuhan ekonomi regional yang relatif berkelanjutan. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa kedekatan dengan pusat pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis menjamin stabilitas pasar tenaga kerja di wilayah penyangga.

Fluktuasi TPT yang tinggi di Kabupaten Gowa menunjukkan adanya permasalahan dalam mekanisme penyerapan tenaga kerja, seperti keterbatasan keterkaitan sektoral, perbedaan karakteristik lapangan usaha, serta ketidaksesuaian antara kualitas tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja. Dengan

demikian, Kabupaten Gowa menjadi kasus yang relevan untuk dianalisis guna memahami bagaimana variabel makro ekonomi memengaruhi tingkat pengangguran terbuka, khususnya dalam konteks wilayah yang secara geografis dekat dengan pusat pertumbuhan ekonomi namun menunjukkan dinamika ketenagakerjaan yang tidak stabil.

Salah satu indikator utama yang mencerminkan kinerja ekonomi suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah barang yang dihasilkan suatu wilayah atau daerah selama satu periode dimana jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dinilai dengan uang atas dasar harga pasar yang sedang berjalan (Tarigan Robinson, 2010). Sedangkan menurut Hasibuan dkk, (2019) PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian daerah. Secara teori, semakin tinggi PDRB suatu daerah, semakin besar pula potensi terciptanya lapangan kerja baru, karena meningkatnya kegiatan produksi biasanya akan mendorong permintaan terhadap tenaga kerja. Namun, pada kenyataannya peningkatan PDRB tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan tingkat pengangguran. Oleh karena itu, perlu ditelusuri lebih lanjut bagaimana hubungan antara PDRB dan tingkat pengangguran di Kabupaten Gowa.

Selain itu, modal manusia juga memiliki peran penting terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Modal manusia dalam penelitian ini diukur melalui Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yang menurut Badan Pusat Statistik (2024) merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas hidup penduduk, khususnya dari aspek pendidikan. Pendidikan sebagai komponen utama modal manusia berperan dalam meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan produktivitas tenaga kerja. Individu

dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki daya saing yang lebih baik serta akses yang lebih luas terhadap peluang kerja di berbagai sektor ekonomi. Oleh karena itu, secara teoritis, peningkatan modal manusia yang tercermin melalui RLS diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka melalui peningkatan kualitas dan kesiapan tenaga kerja dalam memasuki pasar kerja.

Faktor lain yang turut memengaruhi pengangguran adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Menurut peraturan menteri tenaga kerja (1999), Upah Minimum Regional Tingkat II untuk selanjutnya disebut UMR Tk.II adalah upah minimum yang berlaku di daerah Kabupaten/Kotamadya atau menurut wilayah pembangunan ekonomi daerah atau karena kekhususan wilayah tertentu. Penetapan UMK ini bertujuan untuk memastikan pekerja mendapatkan penghasilan yang layak. Upah Minimum ini sering digunakan sebagai acuan perusahaan menetapkan upah tenaga kerja. Dan ketika upah minimum lebih tinggi daripada produktivitas tenaga kerja, maka akan merugikan perusahaan karena dapat menyebabkan naiknya biaya produksi (Surachman & Janeman, 2020). Oleh karena itu, kebijakan upah minimum harus dianalisis secara cermat untuk melihat pengaruhnya terhadap tingkat pengangguran.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Gowa mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, meskipun PDRB daerah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Gowa belum secara otomatis diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran. Fenomena tersebut menjadi semakin menarik mengingat Kabupaten Gowa memiliki posisi strategis sebagai wilayah yang

berbatasan langsung dengan Kota Makassar, yang berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana secara teori, kedekatan dengan pusat pertumbuhan seharusnya mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui efek limpahan aktivitas ekonomi. Sehingga menegaskan adanya ketidaksinkronan antara pertumbuhan ekonomi dan dinamika pasar tenaga kerja di Kabupaten Gowa.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Modal manusia, dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Gowa. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui faktor-faktor yang menyebabkan pengangguran berfluktuasi meskipun ekonomi daerah terus tumbuh. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat dan berkelanjutan.

Dengan demikian, skripsi berjudul **Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Gowa Tahun 2010 – 2024** bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang memengaruhi TPT serta memberikan rekomendasi strategis untuk mengatasinya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah PDRB berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Gowa?

2. Apakah Modal Manusia berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Gowa?
3. Apakah Upah Minimum Kabupaten (UMK) berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Gowa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu

1. Untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Gowa.
2. Untuk menganalisis pengaruh Modal Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Gowa.
3. Untuk menganalisis pengaruh UMK terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Gowa.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah maupun instansi terkait dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Gowa.
2. Dapat digunakan sebagai salah satu bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti topik yang berkaitan dan relevan dengan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran terbuka di daerah lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Penawaran Tenaga Kerja

Teori penawaran tenaga kerja merupakan teori utama dalam ekonomi ketenagakerjaan yang menjelaskan bagaimana pasar tenaga kerja mencapai titik keseimbangan melalui interaksi antara permintaan tenaga kerja dari perusahaan dan penawaran tenaga kerja dari individu. Teori ini berakar kuat pada pemikiran ekonomi yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti G.S Becker (1962) dan Olivier Blanchard (2017).

Dalam *Investment in Human Capital*, Gary S. Becker (1962) membahas penawaran tenaga kerja melalui individu yang memutuskan untuk berinvestasi dalam human capital. Becker berpendapat bahwa pekerja membayar seluruh biaya pelatihan dari Perusahaan berupa penerimaan upah dibawah marginal product selama masa pelatihan, karena keterampilan tersebut dapat digunakan di banyak perusahaan

$$(W = MP_0 - C).$$

Mekanisme yang sama juga berlaku untuk pendidikan formal. Dimana individu sendiri yang menanggung biaya pendidikannya, baik berupa penghasilan yang hilang karena tidak bekerja (foregone earnings) maupun biaya langsung seperti uang sekolah. Oleh karena itu, penghasilan yang benar-benar relevan adalah penghasilan bersih (net earnings) setelah dikurangi biaya-biaya itu. Investasi dalam pendidikan ini membuat kurva upah seseorang naik tajam seiring bertambahnya usia. Selain itu, jumlah tenaga kerja terampil yang tersedia di pasar

ditentukan oleh seberapa mampu individu tersebut membiayai pendidikan dan bersabar menunggu imbalannya di masa depan.

Sementara itu, Olivier Blanchard (2017) dalam bukunya *Macroeconomics* edisi ke-7 membahas teori penawaran tenaga kerja secara lebih jelas dalam kerangka pasar tenaga kerja makroekonomi. Dalam buku ini, Blanchard menggunakan pendekatan *wage-setting* (penentuan upah oleh pekerja) dan *price-setting* (penentuan upah oleh perusahaan) untuk menjelaskan bagaimana upah dan tingkat pengangguran ditentukan, yang pada akhirnya keduanya membentuk *natural rate of unemployment*. Pendekatan ini berbeda dari teori mikro standar, tetapi tetap dapat dipahami sebagai versi makro dari penawaran dan permintaan tenaga kerja.

Penawaran tenaga kerja dalam Blanchard tercermin melalui *wage-setting relation*, yaitu

$$W/P^e = F(u, z)$$

Yang berarti upah riil yang diharapkan (W/P^e) ditentukan oleh tingkat pengangguran (u) dan berbagai faktor institusional (z). Upah riil disini hubungannya negatif dengan tingkat pengangguran, kalau pengangguran tinggi (u besar), posisi tawar pekerja lemah, jadi mereka hanya bisa mendapat upah riil yang lebih rendah. Dan sebaliknya, Hubungannya positif dengan faktor z , seperti tunjangan pengangguran yang lebih besar, upah minimum yang lebih tinggi, perlindungan kerja yang kuat, atau kekuatan serikat buruh. Faktor-faktor ini membuat pekerja bisa menuntut upah lebih tinggi.

Dalam kerangka teori penawaran tenaga kerja, individu dipandang sebagai agen rasional yang berupaya memaksimalkan utilitas dengan mempertimbangkan

pilihan antara bekerja (mendapatkan upah) dan waktu luang. Dalam pasar tenaga kerja yang kompetitif, keputusan individu untuk menawarkan tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat upah yang diterima. Ketika tingkat upah meningkat, individu terdorong untuk meningkatkan penawaran tenaga kerja karena adanya insentif ekonomi yang lebih besar (substitution effect), yaitu kecenderungan untuk menggantikan waktu luang dengan waktu bekerja. Namun, pada tingkat upah tertentu, peningkatan pendapatan juga dapat mendorong individu untuk mengurangi jam kerja karena kebutuhan ekonominya telah terpenuhi (income effect).

Penelitian ini menggunakan pendekatan penawaran tenaga kerja untuk memperkuat hipotesis adanya hubungan antara Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Dalam perspektif teori penawaran tenaga kerja, kenaikan tingkat upah minimum akan meningkatkan insentif bagi individu untuk masuk ke dalam pasar kerja. Peningkatan upah mendorong bertambahnya jumlah angkatan kerja karena individu terdorong untuk menawarkan tenaga kerjanya guna memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Namun demikian, peningkatan penawaran tenaga kerja tersebut tidak selalu diikuti oleh peningkatan permintaan tenaga kerja dari sisi perusahaan. Apabila jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak mampu menyerap tambahan tenaga kerja yang masuk ke pasar kerja, maka akan terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja (excess supply) yang pada akhirnya meningkatkan tingkat pengangguran terbuka.

Dengan demikian, dalam sisi supply tenaga kerja, kenaikan UMK berkontribusi menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Hal ini mendukung hipotesis penelitian bahwa terdapat hubungan negatif antara UMK dan TPT di Kabupaten Gowa.

2.1.2 Hukum Okun

Okun's Law merupakan teori ekonomi makro yang diteliti oleh Arthur Melvin Okun yang menjelaskan hubungan terbalik antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Dalam teorinya, Okun (1962) menyatakan bahwa setiap kenaikan pengangguran sebesar 1 persen, akan diikuti dengan penurunan output sebesar 2 – 3 persen. Blanchard dan Johnson (2013) menjelaskan bahwa hubungan ini muncul ketika tingkat pengangguran meningkat, penggunaan tenaga kerja dan kapasitas produksi menjadi lebih rendah, sehingga output yang dihasilkan berada di bawah tingkat output potensial.

Hubungan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi faktor penting dalam menciptakan lapangan kerja dan menekan pengangguran. Okun dalam Samuelson (2010) menyatakan, setiap penurunan PDB sebesar 2 persen, tingkat pengangguran akan naik 1 persen. Jadi apabila PDB semula 100 persen dan kemudian menjadi 98 persen, maka tingkat pengangguran melonjak dari 6 ke 7 persen.

Hukum Okun mempunyai kontribusi yang besar bagi pengaplikasian kebijakan fiskal dan moneter. Samuelson dan Nordhaus (2010) menjelaskan bahwa hukum okun telah memberikan aturan sederhana yang membantu pemerintah untuk menghitung seberapa besar pendapatan nasional yang hilang akibat meningkatnya pengangguran. Teori ini juga menekankan bahwa penurunan pengangguran tidak semata-mata terjadi karena peningkatan kesempatan kerja langsung, tetapi juga karena peningkatan aktivitas ekonomi yang menyebabkan perusahaan menambah lapangan pekerjaan.

Okun menemukan bahwa terdapat hubungan yang terjadi dalam waktu yang bersamaan antara pertumbuhan PRDB dan perubahan tingkat pengangguran di mana perubahan pada pertumbuhan PRDB diikuti oleh perubahan pada tingkat pengangguran. Ball, Leigh, dan Loungani (2017) menyatakan bahwa hukum okun tidak bersifat tetap, melainkan berbeda-beda antarnegara dan dapat berubah sepanjang waktu. Dengan kata lain, hubungan antara perubahan pengangguran dan perubahan PRDB riil tidak universal, tetapi sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu perekonomian menyesuaikan tenaga kerjanya.

Dalam konteks penelitian pengangguran daerah seperti Kabupaten Gowa, Okun's Law menjadi sangat relevan karena pertumbuhan PDRB mencerminkan kemampuan daerah dalam menggerakkan sektor-sektor produktif. Apabila PDRB meningkat tetapi tidak diikuti penurunan pengangguran, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum mampu menyerap tenaga kerja atau lebih bertumpu pada sektor padat modal. Oleh karena itu, teori ini memberikan landasan kuat untuk menjelaskan peran PDRB sebagai determinan tingkat pengangguran terbuka.

2.1.3 Teori Modal Manusia

Human Capital Theory pertama kali diperkenalkan oleh Theodore W. Schultz tahun 1961 yang menyatakan bahwa manusia merupakan suatu bentuk modal atau kapital sebagaimana bentuk-bentuk kapital lainnya seperti mesin, teknologi, uang dan material, Konsep itu kemudian disempurnakan oleh Becker pada tahun 1964 yang mendefinisikan yang menegaskan bahwa manusia tidak hanya berperan sebagai sumber daya, tetapi juga sebagai investasi yang mampu

memberikan hasil di masa depan. Dengan kata lain, pendidikan, keterampilan, pengalaman, dan pelatihan merupakan bentuk investasi terhadap diri seseorang yang meningkatkan produktivitas dan peluang mereka dalam pasar kerja (Becker, 1964).

Menurut Schultz (1961), perbedaan pendapatan yang sangat besar disebabkan oleh perbedaan kualitas kesehatan dan pendidikan. Banyak di antara tenaga kerja yang hampir tidak punya akses terhadap pendidikan formal, memiliki kondisi kesehatan yang buruk, sehingga hanya mampu mengerjakan jenis pekerjaan dengan nilai ekonomi yang rendah. Menurut Becker (1964), individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki keterampilan yang lebih baik, sehingga dapat menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan individu dengan pendidikan rendah.

Mincer (1974) juga menyatakan bahwa semakin lama seseorang menempuh pendidikan, maka semakin tinggi pula pendapatan yang berpotensi diperolehnya. Ini tetap konsisten meskipun telah memperhitungkan perbedaan kemampuan, latar belakang keluarga, dan karakteristik individu lainnya. Menurutnya, pendidikan meningkatkan pendapatan karena dapat memperbaiki keterampilan, meningkatkan produktivitas, serta memperluas kemampuan seseorang untuk mengerjakan tugas yang lebih besar. Ia juga menekankan bahwa pengalaman kerja memiliki peran penting dalam menambah pendapatan melalui keterampilan yang diperoleh di tempat kerja. Kombinasi pendidikan dan pengalaman inilah yang menjadi fondasi teori modal manusia dan menjelaskan variasi pendapatan antarindividu.

Dalam penelitian ini, Human Capital Theory digunakan untuk menjelaskan pengaruh Modal pendidikan yang diukur dengan Rata-rata lama sekolah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi peluang seseorang mendapatkan pekerjaan dan semakin kecil kemungkinan mereka menganggur. Dengan demikian, teori ini memberikan kerangka analisis yang kuat untuk memahami hubungan antara pendidikan dan pengangguran di tingkat regional.

1.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Produk Domestik Regional Bruto dengan Tingkat Pengangguran Terbuka

Secara teoritis, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki hubungan negatif dengan tingkat pengangguran terbuka. Hal ini dijelaskan dalam Hukum Okun (Okun's Law) yang pertama kali dikemukakan oleh Arthur M. Okun pada tahun 1962. Hukum Okun (Okun's law) menjelaskan hubungan negatif antara pengangguran dengan PDRB. Bahwa setiap pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, maka tingkat pengangguran cenderung meningkat, Sebaliknya, apabila pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, maka masalah pengangguran dapat berkurang (Suhendra & Wicaksono, 2020). Hubungan ini bukanlah hukum kausal mutlak, melainkan pola yang mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menciptakan dan menyediakan lapangan kerja bagi penduduknya.

Teori penawaran dan permintaan tenaga kerja menjelaskan bahwa keseimbangan pasar tenaga kerja ditentukan oleh interaksi antara jumlah tenaga kerja yang ditawarkan dengan jumlah tenaga kerja yang diminta. Ketika PDRB

tumbuh, kurva permintaan tenaga kerja bergeser ke kanan, karena perusahaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk memenuhi peningkatan output. Pergeseran ini menyebabkan upah cenderung meningkat dan jumlah tenaga kerja yang terserap menjadi lebih besar. Kondisi ini pada akhirnya menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Sebaliknya, ketika PDRB stagnan atau menurun, permintaan tenaga kerja ikut melemah sehingga pengangguran cenderung meningkat.

Hukum Okun memperkuat penjelasan tersebut dengan menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Okun (1962), serta Samuelson dan Nordhaus (2010), menunjukkan bahwa ketika output meningkat, kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan digunakan secara lebih optimal. Perusahaan akan berusaha memaksimalkan produksinya untuk memenuhi permintaan pasar, sehingga membutuhkan tambahan tenaga kerja. Dengan demikian, jarak antara output aktual dan output potensial menjadi semakin kecil, dan tingkat pengangguran pun menurun. Karena itu, menurut Hukum Okun, kenaikan PDRB secara langsung berkaitan dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka. Semakin besar pertumbuhan ekonomi, semakin besar pula penyerapan tenaga kerja yang terjadi.

Dalam konteks regional seperti Kabupaten Gowa yang ekonominya masih didominasi sektor pertanian, perdagangan, konstruksi, dan industri pengolahan ringan (BPS Kab Gowa, 2023), Hukum Okun menjadi sangat relevan karena sektor-sektor ini bersifat padat karya (labor-intensive). Pertumbuhan PDRB yang tinggi di sektor-sektor tersebut cenderung langsung meningkatkan permintaan tenaga kerja, terutama tenaga kerja dengan keterampilan rendah hingga menengah, sehingga mampu menekan tingkat pengangguran terbuka dengan

cepat. Sebaliknya, jika pertumbuhan PDRB hanya didorong oleh sektor padat modal (capital-intensive) atau sektor jasa modern yang membutuhkan skill tinggi, efek penyerapan tenaga kerja menjadi lemah. Oleh karena itu, kualitas pertumbuhan PDRB menjadi penentu utama seberapa efektif pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat pengangguran di Kabupaten Gowa.

2.2.2 Hubungan Modal Manusia dengan Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut Human Capital Theory yang dikemukakan Schultz (1961) dan disempurnakan oleh Becker (1964), pendidikan merupakan bentuk investasi yang meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan kemampuan seseorang untuk menghasilkan output yang lebih tinggi. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kualitas modal manusia yang lebih baik, sehingga lebih mudah diserap pasar kerja. Seiring dengan peningkatan tingkat pendidikan, kualitas modal manusia juga mengalami peningkatan yang tercermin dari bertambahnya keterampilan, pengetahuan, serta kemampuan individu dalam memasuki pasar kerja. Oleh karena itu, untuk menurunkan tingkat pengangguran, masih sangat bergantung pada kesiapan tenaga kerja dalam menyesuaikan diri dengan peluang kerja yang tersedia di pasar kerja.

Teori human capital menyatakan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan meningkatkan produktivitas dan kemampuan untuk memperoleh pekerjaan. Produktivitas tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh besarnya investasi yang dimiliki, terutama dalam aspek pendidikan. Peningkatan produktivitas ini sering menjadi alasan mengapa individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan peluang kerja yang lebih baik (Becker, 1964).

Teori penawaran tenaga kerja, sebagaimana dijelaskan oleh Becker (1976) dan Borjas (2020), menegaskan bahwa keputusan individu untuk bekerja dipengaruhi oleh preferensi, produktivitas, dan kesempatan ekonomi. Pendidikan akan membantu individu dalam menemukan jenis pekerjaan yang sesuai, menentukan upah yang layak, dan beradaptasi dengan kondisi pasar kerja. Individu dengan tingkat pendidikan tinggi tidak hanya lebih produktif, tetapi juga memiliki lebih banyak informasi, jaringan, dan akses terhadap peluang kerja. Sebaliknya, individu berpendidikan rendah sering kali terjebak pada pekerjaan informal, upah rendah, dan ketidakpastian kesempatan kerja, yang membuat TPT pada kelompok ini jauh lebih tinggi. Dengan demikian, pendidikan memperkuat posisi seseorang dalam penawaran tenaga kerja dan mengurangi risiko menganggur.

Namun, di negara berkembang seperti Indonesia, hubungan tersebut sering melemah akibat fenomena skill mismatch dan over-education. Banyak lulusan perguruan tinggi justru bekerja di sektor yang tidak sesuai bidangnya atau bahkan di bawah kualifikasi (diploma disease), sementara lulusan SMA/SMK tetap mendominasi angka pengangguran terbuka karena kurangnya pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri lokal.

2.2.3 Hubungan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Dari sudut pandang teori penawaran tenaga kerja, kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) memengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) melalui perubahan keputusan individu dalam memasuki pasar kerja. Dalam kerangka ini, individu diasumsikan sebagai agen rasional yang berupaya

memaksimalkan utilitas dengan mempertimbangkan pilihan antara bekerja dan waktu luang. Ketika upah meningkat, insentif untuk bekerja juga meningkat, sehingga mendorong lebih banyak individu untuk masuk ke dalam angkatan kerja atau meningkatkan partisipasi kerjanya.

Teori ini juga menjelaskan bahwa dampak kenaikan UMK dapat memperbesar jumlah penawaran tenaga kerja, terutama dari kelompok tenaga kerja yang sebelumnya tidak aktif atau berada di luar angkatan kerja. Kenaikan upah membuat pekerjaan menjadi lebih menarik secara ekonomi, sehingga mendorong masuknya pencari kerja baru ke pasar tenaga kerja. Akibatnya, jumlah tenaga kerja yang tersedia meningkat, khususnya pada sektor-sektor yang tidak mensyaratkan keterampilan tinggi.

Namun demikian, peningkatan penawaran tenaga kerja tersebut tidak selalu diikuti oleh peningkatan kesempatan kerja. Apabila pertumbuhan ekonomi melambat atau kapasitas penyerapan tenaga kerja tidak berkembang secara memadai, maka tambahan tenaga kerja yang masuk ke pasar tidak seluruhnya dapat terserap. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kelebihan penawaran tenaga kerja (*excess supply*), di mana jumlah pencari kerja lebih besar dibandingkan dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia.

Dengan demikian, menurut teori penawaran tenaga kerja, hubungan antara UMK dan Tingkat Pengangguran Terbuka tidak selalu bersifat positif. Dalam kondisi tertentu, kenaikan UMK justru dapat mendorong penurunan tingkat pengangguran terbuka. Hal ini terjadi karena peningkatan upah minimum dapat meningkatkan daya tarik untuk bekerja serta memperbaiki kesejahteraan tenaga kerja, sehingga mendorong peningkatan partisipasi kerja yang lebih produktif.

Selain itu, kenaikan UMK juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya mendorong permintaan barang dan jasa, sehingga membuka peluang kerja baru. Dengan demikian, hubungan antara UMK dan TPT cenderung bersifat negatif, di mana kenaikan UMK dapat diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran terbuka, khususnya apabila didukung oleh kondisi ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara optimal.

Hasil empiris tingkat regional di Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Khoirunnisa dan Rofiki (2025) dalam MATHunesa: Jurnal Ilmiah Matematika (Vol. 13 No. 01) menggunakan model regresi linier berganda dengan data kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2023. Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel upah minimum memiliki koefisien positif dan signifikan secara statistik terhadap TPT, setelah dikontrol oleh rata-rata lama sekolah, PDRB per kapita, dan tingkat partisipasi angkatan kerja.

1.3 Studi Empiris

Rosyid dan Athoillah (2024) meneliti pengaruh laju pertumbuhan PDRB, upah minimum provinsi (UMP), investasi, inflasi, serta dummy variabel Covid-19 terhadap tingkat pengangguran terbuka di 34 provinsi Indonesia (termasuk Sulawesi Selatan yang mencakup Kabupaten Gowa sebagai salah satu observasi penting). Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan model Fixed Effect Model (FEM) yang terpilih setelah uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier. Hasil estimasi menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDRB, UMP, dan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT, sedangkan variabel dummy Covid-19 berpengaruh positif dan signifikan (meningkatkan TPT secara drastis pada 2020–2021), sementara investasi (PMDN+PMA) berpengaruh negatif

namun tidak signifikan. Temuan ini mengonfirmasi bahwa pandemi Covid-19 menjadi shock eksternal terbesar yang mengganggu Hukum Okun di Indonesia, termasuk di wilayah Sulawesi Selatan dan Kabupaten Gowa, di mana pemulihan pasca-pandemi masih belum sepenuhnya menurunkan pengangguran ke level pra-pandemi meskipun pertumbuhan PDRB telah kembali tinggi.

Ningsih dan Pahlevi (2024) menggunakan analisis regresi data panel dengan perangkat lunak Eviews 12 pada data sekunder dari BPS Provinsi Kalimantan Selatan periode 2017-2021, hasil estimasi model Fixed Effect Model (FEM) menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk, PDRB, dan rata-rata lama sekolah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan, dengan nilai F-statistic sebesar 199,1418 dan probabilitas 0,000000, sementara secara parsial, jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan koefisien 0,000004 dan probabilitas 0,0000 yang berarti peningkatan populasi cenderung meningkatkan pengangguran karena ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan kesempatan kerja, PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan dengan koefisien -13,48010 dan probabilitas 0,0000 yang mengindikasikan bahwa peningkatan PDRB dapat menurunkan pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja baru, sedangkan rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh signifikan dengan koefisien -0,148742 dan probabilitas 0,1367 karena mismatch antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan pasar kerja, di mana jumlah penduduk menjadi variabel paling dominan memengaruhi pengangguran; pengujian asumsi klasik juga terpenuhi dengan uji normalitas Jarque-Bera 0,115537, tidak ada multikolinearitas karena nilai VIF di bawah 10, heteroskedastisitas tidak terdeteksi melalui uji Glejser dengan probabilitas di atas

0,05, dan autokorelasi tidak ada dengan nilai Durbin-Watson 1,743281, sehingga model ini valid dan dapat digunakan untuk merekomendasikan kebijakan seperti pengendalian populasi, peningkatan pertumbuhan ekonomi berkualitas, serta peningkatan relevansi pendidikan dengan pasar kerja untuk mengurangi pengangguran.

Budiasih dan Asmara (2024) menggunakan metode regresi data panel dengan model Random Effect Model (REM) yang terpilih setelah pengujian Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier pada data sekunder BPS Provinsi Banten periode 2012-2021, di mana hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel pendidikan rata-rata lama sekolah (RLS) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dengan koefisien -0,070926 dan probabilitas 0,0000 yang berarti peningkatan RLS justru menurunkan penyerapan karena dominasi sektor informal yang lebih mengutamakan keterampilan dan pengalaman daripada tingkat pendidikan formal, upah minimum kabupaten/kota (UMK) juga berpengaruh negatif dan signifikan dengan koefisien -0,115576 dan probabilitas 0,0725 yang mengindikasikan bahwa kenaikan UMK membuat perusahaan enggan merekrut lebih banyak pekerja untuk menekan biaya produksi terutama di sektor non-formal yang tidak terikat standar upah minimum, sementara PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan koefisien 0,698687 dan probabilitas 0,0000 yang menunjukkan bahwa peningkatan PDRB mendorong penyerapan tenaga kerja melalui ekspansi aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru; secara simultan, ketiga variabel berpengaruh dengan F-statistic 50,11452 dan probabilitas 0,000000, koefisien determinasi R-squared 0,664227 menjelaskan 66% variasi penyerapan tenaga kerja, asumsi klasik terpenuhi tanpa multikolinearitas (koefisien korelasi di bawah 0,8) dan

heteroskedastisitas (probabilitas di atas 0,05), sehingga model ini mendukung rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang relevan dengan pasar kerja, penyesuaian UMK yang seimbang, dan stimulasi PDRB untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten.

Khoirunnisa dan Rofiqi (2025) menggunakan metode regresi linear berganda pada data sekunder BPS Jawa Timur tahun 2023 dengan 38 observasi kabupaten/kota, hasil analisis menunjukkan bahwa variabel rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) dengan koefisien 0,380 dan probabilitas 0,004 yang berarti peningkatan durasi pendidikan justru meningkatkan pengangguran karena mismatch antara kualifikasi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja yang lebih mengutamakan keterampilan praktis, PDRB per kapita berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan dengan koefisien -0,000003 dan probabilitas 0,238 yang mengindikasikan bahwa peningkatan PDRB belum cukup kuat menurunkan pengangguran meskipun menciptakan lapangan kerja, upah minimum berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien 0,000001 dan probabilitas 0,011 yang menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum dapat meningkatkan pengangguran karena perusahaan mengurangi perekrutan untuk mengendalikan biaya, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) berpengaruh negatif dan signifikan dengan koefisien -0,100 dan probabilitas 0,043 yang berarti peningkatan partisipasi justru menurunkan pengangguran melalui dinamika pasar kerja yang lebih aktif; secara simultan, keempat variabel berpengaruh signifikan dengan F-statistic 9,853 dan probabilitas 0,000, koefisien determinasi R-squared 0,5443 menjelaskan 54,43% variasi TPT, asumsi klasik terpenuhi dengan residual normal (Asymp. Sig. 0,200), tidak ada multikolinearitas (VIF).

Berdasarkan hasil penelitian, Khoirunnisa dan Rofiki (2025) menyimpulkan bahwa rata-rata lama sekolah, PDRB per kapita, upah minimum, dan tingkat partisipasi angkatan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Secara parsial, PDRB per kapita dan tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT, sedangkan rata-rata lama sekolah dan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum di Jawa Timur cenderung meningkatkan tingkat pengangguran terbuka, yang mengindikasikan adanya penyesuaian dari sisi permintaan tenaga kerja akibat meningkatnya biaya tenaga kerja. Dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 54,43 persen, model mampu menjelaskan lebih dari setengah variasi TPT, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Hasil ini menegaskan bahwa kebijakan upah minimum di tingkat daerah perlu dirancang secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi pasar tenaga kerja dan struktur ekonomi wilayah agar tidak berdampak pada peningkatan pengangguran terbuka.

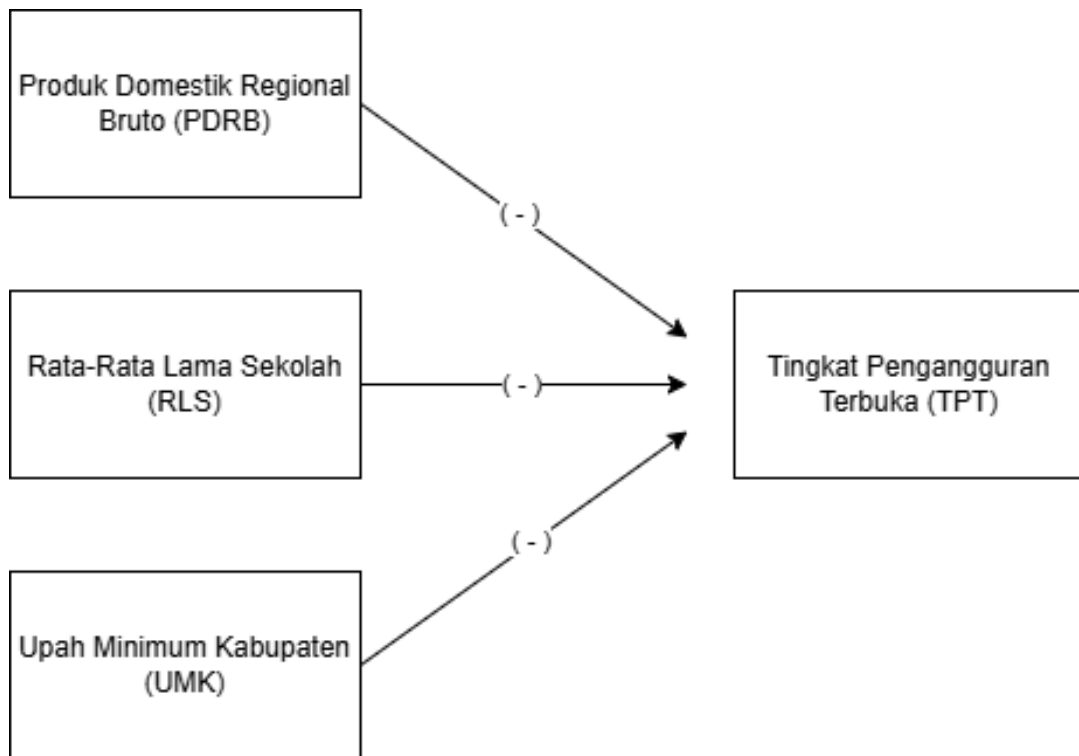
1.4 Kerangka Pikir

Berdasarkan pendekatan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Salah satu faktor tersebut adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencerminkan kondisi perekonomian suatu daerah. Semakin tinggi tingkat PDRB, maka aktivitas ekonomi semakin meningkat, sehingga peluang terciptanya lapangan kerja juga semakin besar. Dengan demikian, peningkatan PDRB cenderung menyebabkan tingkat pengangguran menjadi lebih rendah.

Selain itu, Modal Manusia juga berpengaruh terhadap pengangguran. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka kemampuan dan keterampilan tenaga kerja akan semakin sesuai dengan kebutuhan pasar kerja (matching antara pendidikan dan lapangan kerja). Oleh karena itu, pendidikan memiliki hubungan negatif dengan tingkat pengangguran, di mana peningkatan pendidikan cenderung menurunkan pengangguran.

Faktor lain yang turut memengaruhi tingkat pengangguran adalah upah. Dalam teori ekonomi ketenagakerjaan, upah dipengaruhi oleh tingkat harga dan kondisi pengangguran. Upah juga menjadi salah satu pertimbangan utama bagi individu dalam memutuskan untuk bekerja. Apabila tingkat upah meningkat, maka cenderung akan menyebabkan menurunnya tingkat pengangguran.

Berangkat dari keterkaitan tersebut, kerangka pikir penelitian ini menggambarkan bagaimana masing-masing variabel memberi pengaruh negatif terhadap TPT. Peningkatan PDRB diharapkan menurunkan TPT dari meningkatnya aktivitas ekonomi. Pendidikan yang lebih tinggi menurunkan TPT karena meningkatkan kemampuan tenaga kerja memasuki pasar kerja. Begitu pula UMK yang ideal dan sesuai dapat mendorong penyerapan tenaga kerja yang lebih stabil. Ketiga hubungan negatif inilah yang menjadi dasar kerangka pikir penelitian mengenai faktor-faktor determinan TPT di tingkat regional.



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian

1.5 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diduga PDRB berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kab. Gowa
2. Diduga Modal Manusia Berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kab. Gowa

Diduga Upah Minimum Kabupaten berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kab. Gowa